

ISSN 0251-286X  
TERAKREDITASI

# BULETIN PSP

Volume XVI. No. 2 Agustus 2007



Departemen Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan  
Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan  
Institut Pertanian Bogor

**PERANAN KEBIJAKAN PUBLIK, ORIENTASI KEWIRAUSAHAAN  
DAN KOMPETENSI SUMBERDAYA MANUSIA DALAM  
PENGEMBANGAN PRODUK PERIKANAN PRIMA**

*(The Role of Public Policy, Entrepreneurial Orientation and Human  
Resources Competency on Development of Prime Fishery Products)*

Oleh :

Abdul Rokhman<sup>1)</sup>, John Haluan<sup>2)</sup>, Ari Purbayanto<sup>2)</sup>, Victor PH. Nikujuluw<sup>3)</sup>

Diterima : 30 Juni 2007 ; Disetujui : 31 Juli 2007

**ABSTRACT**

Development of fish processing industry in Indonesia obtain a new momentum since issuing the act No. 31/2004 regarding fisheries and determining of agriculture revitalization in the National Development Agenda 2004-2009. The strategy that can be carried out to accelerate development of fish processing industry is development of Prime Fishery Products, those are high quality, safety, competitive and high value added fishery products. The aim of research is to improve quality of public policies in development of fish processing industry, by analyzing factors those have role to Prime Fishery Products, which are (1) public policy related to quality and safety assurance, (2) entrepreneurial orientation, and (3) human resource competency. The research sample is frozen fish processing plants located in Banten Province, Jakarta Province, West Java Province, Central Java Province, Yogyakarta Province and East Java Province. The research is used the descriptive method survey and compiled data are analyzed using Structural Equation Modeling (SEM) method. The result of research is point out criteria of Prime Fishery Products that strongly influence is competitiveness, followed by quality and safety assurance. While value adding is not significantly influence. All determinant factors of Prime Fishery Products are significantly having roles. The leading role is entrepreneurial orientation, followed by public policy and human resource competency.

**Keywords:** prime fishery products, public policy, entrepreneurial orientation, human resource competency

**ABSTRAK**

Pembangunan industri pengolahan ikan di Indonesia mendapat momentum baru sehubungan dengan lahirnya Undang-undang No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan dan ditetapkannya Revitalisasi Pertanian dalam Agenda

---

1) PT. Perikanan Nusantara (Persero) Jl. Hasyim Ashari No. 17 Jakpus Telp. (021) 87229457, Email : abjuna@yahoo.com

2) Staf Pengajar Departemen Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan FPI-IPB

3) Sekretaris Direktorat Jenderal Pemasaran Pengelolaan Hasil Perikanan (P2HP), DKP

Pembangunan Nasional 2004-2009. Salah satu strategi yang dapat ditempuh untuk mengakselerasi pembangunan industri pengolahan ikan adalah pengembangan Produk Perikanan Prima, yaitu produk perikanan yang mempunyai jaminan mutu dan keamanan tinggi, berdaya saing tinggi dan bernilai tambah tinggi. Secara umum penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas kebijakan pembangunan industri pengolahan ikan, dengan menganalisis faktor-faktor yang berperan terhadap Produk Perikanan Prima, yaitu (1) kebijakan publik di bidang mutu dan keamanan produk, (2) orientasi kewirausahaan, dan (3) kompetensi sumberdaya manusia. Sampel penelitian adalah Unit Pengolahan Ikan Beku yang berada di Provinsi Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI. Yogyakarta dan Jawa Timur. Penelitian ini menggunakan metoda survei dan data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan pemodelan persamaan struktural (*Structural Equation Modeling* - SEM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kriteria Produk Perikanan yang paling kuat adalah daya saing, diikuti jaminan mutu dan keamanan produk. Sedangkan nilai tambah produk tidak berpengaruh secara signifikan pada taraf kepercayaan 1%. Seluruh faktor penentu Produk Perikanan Prima berpengaruh secara signifikan, yang paling kuat adalah orientasi kewirausahaan, diikuti kebijakan publik dan kompetensi sumberdaya manusia.

**Kata kunci :** produk perikanan prima, kebijakan publik, orientasi kewirausahaan dan kompetensi sumberdaya manusia

## 1. PENDAHULUAN

Revisi Undang-Undang Nomor 9/1985 Tentang Perikanan menjadi Nomor 31/2004 Tentang Perikanan memberi arah baru dalam pengelolaan perikanan, karena tidak hanya menyangkut manajemen sumberdaya ikan di laut tetapi juga di perairan lainnya, tidak hanya menyangkut kegiatan penangkapan ikan saja tetapi juga pembudiyaan ikan, tidak hanya mencakup aspek produksi dan pengelolaan tetapi termasuk aspek pengolahan dan pemasaran ikan (Nikijuluw, 2005). Penegasan mengenai masuknya aspek pengolahan dan pemasaran dalam pengelolaan perikanan tertuang dalam pasal 25 Undang-Undang No. 31/2004, dimana dinyatakan bahwa "*usaha perikanan dilaksanakan dalam sistem bisnis perikanan yang meliputi praproduksi, produksi, pengolahan dan pemasaran*".

Sejalan dengan perubahan arah pengelolaan perikanan tersebut di atas, dalam Agenda Pembangunan Nasional 2004-2009, pemerintah menetapkan bahwa salah satu prioritas dan arah pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia adalah Revitalisasi Pertanian. Kebijakan ini diarahkan untuk mendorong pengamanan ketahanan pangan, peningkatan daya saing, diversifikasi, peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan dan kehutanan. Hal ini mengandung makna bahwa upaya-upaya ke arah peningkatan pasca panen (pengolahan dan pemasaran) harus dilakukan secara lebih intensif dan mendapat prioritas tinggi dalam pembangunan kelautan dan perikanan, pertanian, dan kehutanan.

Amanat konstitusi dan kebijakan pembangunan nasional di atas merupakan momentum baru pembangunan industri pengolahan ikan di Indonesia, karena selama ini industri tersebut kurang mendapat perhatian yang semestinya. Hal ini tercermin dari ketiadaan kebijakan makro yang diformulasi secara khusus untuk mengembangkan industri pengolahan ikan di dalam negeri. Dampaknya, industri tersebut berkembang secara lamban, tanpa arah yang jelas dan diliputi berbagai permasalahan *inherent* seperti kualitas kompetensi sumberdaya manusia yang rendah, kelemahan kelembagaan dan keburukan manajemen. Kondisi ini menyebabkan industri pengolahan ikan di Indonesia tertinggal dibandingkan dengan industri serupa di negara tetangga terutama Thailand, Singapura dan Filipina.

Bertitik tolak dari kondisi di atas, maka perlu dilakukan akselerasi dalam pengembangan industri pengolahan ikan. Salah satu strategi yang dapat ditempuh adalah pengembangan "Produk Perikanan Prima". Pada saat ini diskripsi mengenai Produk Perikanan Prima belum dibakukan, namun dalam penelitian ini Produk Perikanan Prima didiskripsikan sebagai produk perikanan yang mempunyai jaminan mutu dan keamanan produk yang tinggi, berdaya saing tinggi dan memberikan nilai tambah tinggi.

Justifikasi mengenai pentingnya jaminan mutu dan keamanan produk adalah dalam rangka merespon tuntutan konsumen akan hal itu yang semakin meningkat dewasa ini, sehubungan dengan meningkatnya

peradaban umat manusia. Sementara itu, daya saing yang tinggi diperlukan untuk mempertahankan dan meningkatkan akses pasar domestik dan internasional yang semakin kompetitif. Produk bernilai tambah tinggi diperlukan untuk meningkatkan margin pendapatan pelaku usaha guna mengembangkan dan menjamin keberlangsungan berusaha, yang pada gilirannya akan meningkatkan kinerja industri pengolahan ikan. Disamping itu, dalam skala yang lebih makro, pengembangan produk bernilai tambah tinggi diperlukan dalam rangka meningkatkan manfaat ekonomi dan efisiensi dalam pemanfaatan sumberdaya ikan.

Dengan asumsi bahwa biaya tidak menjadi faktor pembatas, keberhasilan pengembangan Produk Perikanan Prima ditentukan oleh tiga faktor, yaitu : (1) kebijakan publik, (2) orientasi kewirausahaan, dan (3) kompetensi SDM. Sehubungan dengan itu, maka perlu dilakukan penelitian untuk menganalisis secara mendalam peranan kebijakan publik, orientasi kewirausahaan dan kompetensi SDM serta interaksinya satu sama lain dalam pengembangan Produk Perikanan Prima. Data dan informasi yang diperoleh diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan untuk meningkatkan kualitas kebijakan publik yang terkait dengan pembangunan industri pengolahan ikan.

Secara umum tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan kualitas kebijakan pembangunan industri pengolahan ikan.

## **2. METODOLOGI PENELITIAN**

### **2.1 Waktu dan Tempat Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan melalui tahapan persiapan, pengumpulan data, pengolahan data, dan analisis data. Tahap persiapan dan pengumpulan data dilakukan selama 10 bulan, mulai bulan April 2006 sampai dengan Januari 2007, sedangkan pengolahan dan analisis data dilakukan mulai bulan Januari sampai dengan Mei 2007. Kegiatan persiapan, pengolahan dan analisis data dilaksanakan di Jakarta, sedangkan pengumpulan data dilakukan di Provinsi Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI. Yogyakarta dan Jawa Timur.

## 2.2 Kerangka Analisis

Dari konstruksi yang menggambarkan hubungan antara kebijakan publik, orientasi kewirausahaan dan kompetensi SDM dengan Produk Perikanan Prima, ditentukan empat peubah utama, yaitu : Produk Perikanan Prima ( $Y$ ), Kebijakan Publik ( $X_1$ ), Orientasi Kewirausahaan ( $X_2$ ) dan Kompetensi SDM ( $X_3$ ). Definisi operasional peubah utama tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Produk Perikanan Prima ( $Y$ ) adalah produk yang berasal dari sumberdaya ikan dan diolah sedemikian rupa sehingga nilainya bertambah serta mempunyai kinerja yang sangat baik sehingga dapat ditawarkan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen, sehingga setidaknya-tidaknya harus memenuhi tiga kriteria, yakni mempunyai jaminan mutu dan keamanan tinggi, bernilai tambah tinggi serta berdaya saing tinggi.
- 2) Kebijakan publik ( $X_1$ ) adalah tindakan-tindakan pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu, mempunyai tujuan tertentu dan ditujukan untuk kepentingan masyarakat (Young and Quinn, 2002 dalam Suharto, 2005). Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan kebijakan publik adalah Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. Kep. 01/Men/2002 Tentang Sistem Manajemen Mutu Terpadu Hasil Perikanan.
- 3) Orientasi kewirausahaan ( $X_2$ ) adalah kombinasi dari tiga dimensi manajerial, yaitu kemampuan berinovasi, sikap proaktif dan pengambilan resiko (Lumpkin & Dess, 1996 dalam Rachmadi, 2005).
- 4) Kompetensi SDM ( $X_3$ ) merupakan karakteristik yang mendasari seseorang yang memungkinkan orang tersebut menunjukkan kinerja superior dalam suatu pekerjaan, tugas atau situasi (Shermon, 2004)

Produk Perikanan Prima ( $Y$ ) adalah peubah dependen yang dipengaruhi oleh tiga peubah lainnya, yaitu kebijakan publik, orientasi kewirausahaan dan kompetensi SDM. Peubah ini ditentukan dengan menggunakan tiga peubah terukur, yakni : mutu dan keamanan produk ( $Y_1$ ), nilai tambah ( $Y_2$ ) dan daya saing ( $Y_3$ ).

Kebijakan Publik ( $X_1$ ) merupakan peubah bebas yang dikonstruksi oleh 16 peubah terukur, yaitu : tujuan mengadakan kebijakan adalah rasional ( $X_{1.1}$ ), tujuan mengadakan kebijakan adalah diinginkan masyarakat ( $X_{1.2}$ ), asumsi perumusan kebijakan adalah realistis ( $X_{1.3}$ ), informasi dalam perumusan kebijakan adalah lengkap dan benar ( $X_{1.4}$ ), mampu menyebarkan aspek-aspek positif dari kebijakan ( $X_{1.5}$ ), cukup advokatif dalam hal terjadi perbedaan pandangan ( $X_{1.6}$ ), antisipatif dalam menghadapi perubahan ( $X_{1.7}$ ), SDM yang tersedia mendukung pelaksanaan kebijakan ( $X_{1.8}$ ), pelaksanaan kebijakan didukung ketersediaan anggaran ( $X_{1.9}$ ), sarana dan prasarana dalam pelaksanaan kebijakan tersedia ( $X_{1.10}$ ), informasi yang diperlukan dalam pelaksanaan kebijakan tersedia ( $X_{1.11}$ ), kebijakan yang dilaksanakan memperoleh legitimasi ( $X_{1.12}$ ), adanya partisipasi masyarakat luas dalam pelaksanaan kebijakan ( $X_{1.13}$ ), kepatuhan aparat DKP (Departemen Kelautan dan Perikanan) terhadap ketentuan dalam kebijakan ( $X_{1.14}$ ), kepatuhan aparat Dinas Perikanan dan Kelautan terhadap ketentuan dalam kebijakan ( $X_{1.15}$ ) dan kepatuhan karyawan Unit Pengolahan Ikan terhadap ketentuan dalam kebijakan ( $X_{1.16}$ ).

Orientasi Kewirausahaan ( $X_2$ ) juga merupakan peubah bebas yang dibentuk oleh delapan peubah terukur, yaitu : tindakan kompetitif yang dilakukan oleh perusahaan ( $X_{2.1}$ ), teknik-teknik baru yang dikembangkan perusahaan ( $X_{2.2}$ ), sikap kompetitif yang ditunjukkan perusahaan ( $X_{2.3}$ ), kepemimpinan dalam penelitian dan pengembangan ( $X_{2.4}$ ), jenis-jenis produk baru yang dihasilkan oleh perusahaan ( $X_{2.5}$ ), perubahan yang dilakukan terhadap produk ( $X_{2.6}$ ), kecenderungan berani mengambil resiko ( $X_{2.7}$ ) dan keberanian menghadapi lingkungan bisnis ( $X_{2.8}$ ).

Kompetensi SDM ( $X_3$ ) merupakan peubah bebas yang dikonstruksi oleh sembilan peubah terukur, yaitu : pengetahuan mengenai HACCP (*Hazard Analysis Critical Control Point*) ( $X_{3.1}$ ), pengetahuan mengenai teknologi pengolahan produk bernilai tambah tinggi ( $X_{3.2}$ ), ketrampilan mengenai penerapan HACCP ( $X_{3.3}$ ), ketrampilan mengenai penerapan teknologi pengolahan produk bernilai tambah tinggi ( $X_{3.4}$ ), perusahaan memberikan penghargaan bagi karyawan yang berprestasi ( $X_{3.5}$ ), perusahaan memberi kesempatan kepada karyawan untuk berkembang ( $X_{3.6}$ ), perusahaan memberikan upah/gaji dan fasilitas lain sesuai prestasi kerja ( $X_{3.7}$ ), perusahaan mengembangkan program pelatihan untuk

peningkatan karier ( $X_{3,8}$ ); dan komunikasi interpersonal di perusahaan berjalan dengan baik ( $X_{3,9}$ ).

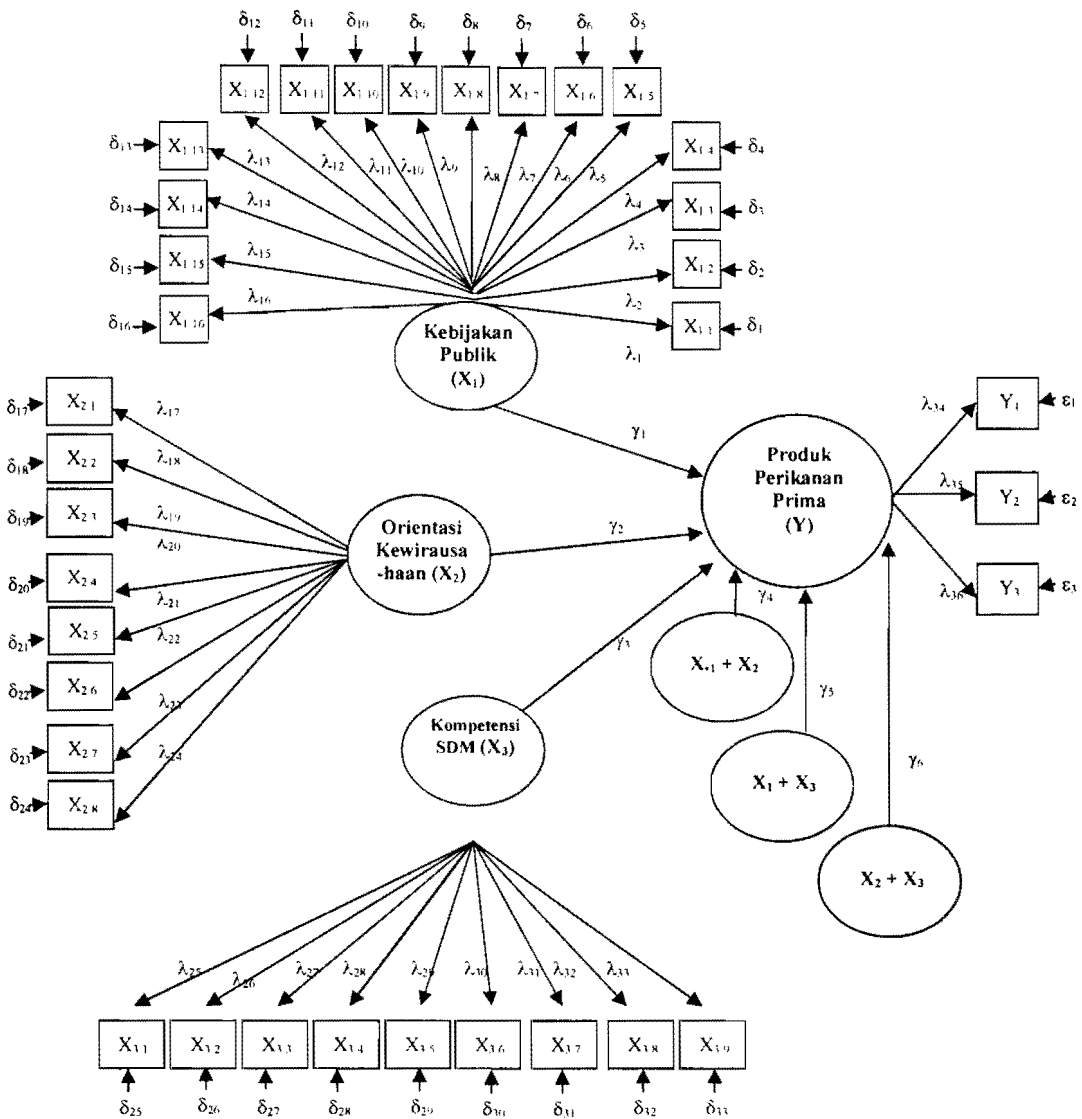
Masing-masing peubah bebas dapat berinteraksi satu sama lain dalam mempengaruhi Produk Perikanan Prima. Oleh karena itu dilakukan juga analisis mengenai interaksi setiap peubah bebas dalam mempengaruhi Produk Perikanan Prima. Kerangka penelitian ini disajikan pada Gambar 1.

### 2.3 Metoda Analisis

Metoda analisis data yang digunakan adalah *path analysis* atau *Structural Equation Modeling (SEM)*, karena penelitian ini melibatkan beberapa peubah sekaligus yang saling berhubungan secara simultan, dimana satu peubah terikat akan menjadi peubah bebas pada hubungan berikutnya. Dalam penelitian ini, Produk Perikanan Prima merupakan peubah laten endogen (*endogenous latent variable*) yang dipengaruhi oleh tiga peubah laten eksogen (*exogenous latent variable*), yakni kebijakan publik, orientasi kewirausahaan dan kompetensi SDM. Ke tiga peubah laten eksogen tersebut dipengaruhi oleh berbagai peubah eksogen terukur, demikian juga Produk Perikanan Prima ditunjukkan oleh beberapa peubah endogen yang diamati.

Analisis SEM dalam penelitian ini menggunakan *software* Program AMOS 5 *Second Order Full Version*. Berdasarkan Gambar 1, model matematis penelitian ini adalah sebagai berikut :





Gambar 1. Model Peranan Kebijakan Publik, Orientasi Kewirausahaan dan Kompetensi Sumberdaya Manusia dalam Pengembangan Produk Perikanan Prima.

1) Konstruksi persamaan "eksogen peubah laten"

$$X_{ij} = \lambda_j X_i + \delta_j \quad \dots\dots\dots(1)$$

dimana ;

- untuk  $i = 1$  ;  $j = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16$
- untuk  $i = 2$  ;  $j = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8$
- untuk  $i = 3$  ;  $j = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9$
- $X_1$  = peubah eksogen laten "kebijakan publik"
- $X_2$  = peubah eksogen laten "orientasi kewirausahaan"
- $X_3$  = peubah eksogen laten "kompetensi sumberdaya manusia"
- $\lambda_j$  = *actor loading*
- $\delta_j$  = galat pengukuran
- $X_{1,1}$  = peubah pengamatan "rasional tidaknya tujuan kebijakan"
- $X_{1,2}$  = peubah pengamatan "diinginkan tidaknya tujuan kebijakan oleh masyarakat"
- $X_{1,3}$  = peubah pengamatan "realistis tidaknya asumsi perumusan kebijakan"
- $X_{1,11}$  = peubah pengamatan "dukungan informasi dalam pelaksanaan kebijakan"
- $X_{1,12}$  = peubah pengamatan "legitimasi kebijakan yang dilaksanakan"
- $X_{1,13}$  = peubah pengamatan "partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan"
- $X_{1,14}$  = peubah pengamatan "kepatuhan aparat DKP terhadap ketentuan dalam kebijakan"
- $X_{1,15}$  = peubah pengamatan "kepatuhan aparat Dinas Perikanan dan Kelautan terhadap ketentuan dalam kebijakan"
- $X_{1,16}$  = peubah pengamatan "kepatuhan karyawan Unit Pengolahan Ikan terhadap ketentuan dalam kebijakan"
- $X_{2,1}$  = peubah pengamatan "tindakan kompetitif yang dilakukan oleh perusahaan"
- $X_{2,2}$  = peubah pengamatan "teknik-teknik baru yang dikembangkan perusahaan"
- $X_{2,3}$  = peubah pengamatan "sikap kompetitif yang ditunjukkan perusahaan"
- $X_{2,4}$  = peubah pengamatan "kepemimpinan dalam penelitian dan pengembangan"

- $X_{2.5}$  = peubah pengamatan "jenis-jenis produk baru yang dihasilkan perusahaan"
- $X_{2.6}$  = peubah pengamatan "perubahan yang dilakukan terhadap produk"
- $X_{2.7}$  = peubah pengamatan "kecenderungan berani mengambil resiko"
- $X_{2.8}$  = peubah pengamatan "keberanian menghadapi lingkungan bisnis"
- $X_{3.1}$  = peubah pengamatan "pengetahuan mengenai HACCP"
- $X_{3.2}$  = peubah pengamatan "pengetahuan mengenai teknologi pengolahan produk bernilai tambah tinggi"
- $X_{3.3}$  = peubah pengamatan "ketrampilan mengenai penerapan HACCP"
- $X_{3.4}$  = peubah pengamatan "ketrampilan mengenai penerapan teknologi pengolahan produk bernilai tambah tinggi"
- $X_{3.5}$  = peubah pengamatan "penghargaan bagi karyawan yang berprestasi"
- $X_{3.6}$  = peubah pengamatan "kesempatan kepada karyawan untuk berkembang"
- $X_{3.7}$  = peubah pengamatan "upah/gaji dan fasilitas lain bagi karyawan"
- $X_{3.8}$  = peubah pengamatan "program pelatihan untuk peningkatan karier"
- $X_{3.9}$  = peubah pengamatan "komunikasi interpersonal pada perusahaan"
- $X_{1.4}$  = peubah pengamatan "lengkap/benar tidaknya informasi dalam perumusan kebijakan"
- $X_{1.5}$  = peubah pengamatan "kemampuan penyebaran manfaat kebijakan"
- $X_{1.6}$  = peubah pengamatan "advokatif tidaknya jika terjadi perbedaan pandangan"
- $X_{1.7}$  = peubah pengamatan "antisipatif tidaknya dalam menghadapi perubahan"
- $X_{1.8}$  = peubah pengamatan "dukungan SDM dalam pelaksanaan kebijakan"
- $X_{1.9}$  = peubah pengamatan "dukungan anggaran dalam pelaksanaan kebijakan"

- $X_{1,10}$  = peubah pengamatan “dukungan sarana prasarana dalam pelaksanaan kebijakan”

## 2) Konstruksi persamaan “endogen Produk Perikanan Prima”

$$Y_i = \lambda_i Y + \varepsilon_i \quad \dots\dots\dots(2)$$

dimana ;

- $i$  = 1, 2, 3
- $Y$  = Produk Perikanan Prima
- $\lambda_i$  = *factor loading*
- $\varepsilon$  = galat pengukuran
- $Y_1$  = peubah pengamatan “jaminan mutu dan keamanan produk”
- $Y_2$  = peubah pengamatan “nilai tambah produk”
- $Y_3$  = peubah pengamatan “daya saing produk”

## 3) Konstruksi persamaan kausalitas eksogen *vs.* endogen

$$Y = \gamma_1 X_1 + \gamma_2 X_2 + \gamma_3 X_3 + \gamma_4 (X_1 * X_2) + \gamma_5 (X_1 * X_3) + \gamma_6 (X_2 * X_3) + \varepsilon \quad \dots\dots\dots(3)$$

dimana ;

- $Y$  = Produk Perikanan Prima
- $X_1$  = Kebijakan publik
- $X_2$  = Orientasi Kewirausahaan
- $X_3$  = Kompetensi Sumberdaya Manusia
- $\gamma$  = Koefisien korelasi
- $\varepsilon$  = galat prediksi (*residual*)

## 2.4 Sampel Penelitian

Sampel penelitian ini adalah Unit Pengolahan Ikan beku di Pulau Jawa (Provinsi Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI. Yogyakarta dan Jawa Timur), dengan pertimbangan bahwa pada tahun 2005, jumlah Unit Pengolahan Ikan beku mencapai 68,32 % dari total Unit Pengolahan Ikan skala besar di Indonesia (684 unit). Dari 440 Unit Pengolahan Ikan beku di seluruh Indonesia, 189 unit (42,95 %)

diantaranya berada di Pulau Jawa sehingga jumlah sampel yang direncanakan adalah 189 unit. Namun pada saat dilakukan pengambilan data diperoleh informasi bahwa 93 unit sudah tidak beroperasi, sembilan unit merupakan *freezer vessel* dan 18 unit tidak bersedia memberikan data sehingga sampel penelitian hanya berjumlah 69 unit.

## 2.5 Pengumpulan Data Peubah Produk Perikanan Prima

Peubah Produk Perikanan Prima ditentukan dengan menggunakan tiga peubah terukur, yakni : jaminan mutu dan keamanan, nilai tambah dan daya saing. Indikator jaminan mutu dan keamanan produk ( $Y_1$ ) adalah rata-rata rasio (%) kasus penahanan/ penolakan dan RASFF (*Rapid Allert System for Food and Feed*) terhadap seluruh frekuensi ekspor (*shipment*) dalam lima tahun terakhir (2002-2006).

Indikator nilai tambah ( $Y_2$ ) adalah rata-rata persentase (%) nilai tambah dari setiap produk yang dihasilkan. Penghitungan nilai tambah menggunakan formula yang dikembangkan dari Zugarramurdi sebagai berikut :

$$VA = \frac{(P - TC) + IC}{P} \times 100 \%$$

dimana ;

- VA = Nilai tambah
- P = Harga jual
- TC = Unit biaya produksi total
- IC = Unit biaya tidak langsung

Sementara itu, indikator daya saing ( $Y_3$ ) adalah rata-rata Indeks RCA (*Revealed Comparative Advantages*), yakni perbandingan pangsa suatu produk yg dihasilkan oleh suatu unit pengolahan ikan (perusahaan) terhadap pangsa ekspor produk tersebut dari seluruh dunia dalam lima tahun terakhir (2002-2006), dihitung dengan menggunakan formula sebagai berikut (Brasili, Epifani & Helg, 1999) :

$$RCA_{jit} = (X_{ijt} / X_{it}) / (W_{it} / W_t) \quad (5)$$

dimana ;

RCA<sub>jit</sub> = indeks daya saing ekspor produk i dari perusahaan j pada tahun t

- $X_{ijt}$  = nilai ekspor produk  $i$  dari perusahaan  $j$  pada tahun  $t$   
 $X_{it}$  = nilai ekspor total produk perikanan dari perusahaan  $j$  pada tahun  $t$   
 $W_{it}$  = nilai ekspor produk  $i$  di dunia pada tahun  $t$   
 $W_t$  = nilai ekspor total produk perikanan dunia pada tahun  $t$

## 2.5 Pengumpulan Data Peubah Kebijakan Publik, Orientasi Kewirausahaan dan Kompetensi Sumberdaya Manusia

Data ke tiga peubah laten ini sebagian besar dikumpulkan melalui observasi penerimaan responden terhadap pernyataan-pernyataan yang diajukan terkait dengan peubah terukur sebagaimana disebutkan di atas. Responsi responden dikelompokkan dalam lima skala penilaian, yaitu : nilai 5 sangat setuju, nilai 4 setuju, nilai 3 setuju/tidak setuju atau ragu-ragu, nilai 2 tidak setuju dan nilai 1 sangat tidak setuju.

Data yang dikumpulkan melalui pengamatan langsung adalah data mengenai kepatuhan pada peubah kebijakan publik dan data mengenai ketrampilan pada peubah kompetensi sumberdaya manusia. Kepatuhan diukur melalui observasi langsung kesesuaian pelaksanaan ketentuan dalam kebijakan yang dilakukan oleh aparat Departemen Kelautan dan Perikanan, aparat Dinas Kelautan dan Perikanan serta karyawan Unit Pengolahan Ikan, dengan menggunakan lima skala penilaian, yaitu: nilai 5 untuk terbaik/terbesar/ tertinggi dan nilai 1 untuk terjelek/ terkecil /terendah. Sementara itu, indikator ketrampilan diukur melalui observasi langsung penerapan HACCP serta teknologi pengolahan ikan, khususnya *value added products* yang dilakukan oleh responden.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 3.1 Hasil

#### 3.1.1 Hasil Analisis Kriteria Produk Perikanan Prima

Seperti diuraikan di atas, Produk Perikanan Prima didiskripsikan sebagai produk perikanan yang mempunyai tiga kriteria, yaitu : (1) bermutu tinggi dan aman dikonsumsi, (2) bernilai tambah tinggi, dan (3) berdaya saing tinggi. Dari hasil analisis dengan menggunakan SEM diketahui bahwa kriteria yang paling kuat adalah daya saing, diikuti mutu dan keamanan produk. Sedangkan nilai tambah tidak berbeda nyata pada taraf 1% (Tabel 1).

Tabel 1. Hasil Analisis Kriteria Produk Perikanan Prima, 2006 (n = 69)

No.	Kriteria Produk Perikanan Prima	Koefisien	Nilai t	Beda nyata
1	Mutu dan keamanan (Y <sub>1</sub> )	0.074	9.25	BN
2	Nilai tambah (Y <sub>2</sub> )	0.003	0.38	TBN
3	Daya saing (Y <sub>3</sub> )	0.457	57.13	BN

Keterangan :

- BN = Berbeda nyata pada taraf 1 %

- TBN = Tidak berbeda nyata

### 3.1.2 Faktor-Faktor Penentu Produk Perikanan Prima

Dari hasil analisis dengan menggunakan SEM diketahui bahwa faktor yang paling besar peranannya terhadap Produk Perikanan Prima adalah orientasi kewirausahaan, diikuti oleh kebijakan publik dan kompetensi SDM (Tabel 2).

Tabel 2. Faktor-faktor Penentu Produk Perikanan Prima, 2006 (n = 69)

Faktor Penentu	Koefisien	Nilai t	Beda nyata
X <sub>1</sub> (Kebijakan Publik)	0.384	48.00	BN
X <sub>2</sub> (Orientasi Kewirausahaan)	0.567	70.88	BN
X <sub>3</sub> (Kompetensi SDM)	0.378	47.25	BN

### 3.1.3 Dekomposisi Faktor-faktor yang Mempengaruhi Produk Perikanan Prima

Hasil analisis terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi Produk Perikanan Prima (Tabel 3) menunjukkan bahwa pada faktor kebijakan publik, dukungan SDM memiliki pengaruh yang paling kuat dan yang paling lemah adalah kepatuhan aparat DKP terhadap ketentuan dalam kebijakan. Pada faktor orientasi kewirausahaan, aspek yang memiliki pengaruh paling kuat adalah tindakan kompetitif dan yang paling lemah adalah kecenderungan mengambil resiko. Sementara itu, pada faktor kompetensi SDM, aspek yang paling kuat pengaruhnya adalah rencana karier bagi karyawan, sedangkan yang paling lemah adalah pengetahuan mengenai HACCP.

### 3.1.4 Korelasi Antar Faktor yang Mempengaruhi Produk Perikanan Prima

Hasil pengujian korelasi antar faktor yang mempengaruhi Produk Perikanan Prima (Tabel 4) menunjukkan bahwa semua korelasi antar faktor berpengaruh terhadap Produk Perikanan Prima. Korelasi yang paling kuat adalah antara faktor orientasi kewirausahaan dengan faktor kompetensi SDM. Selanjutnya, korelasi antara faktor kebijakan publik dengan faktor orientasi kewirausahaan dan yang paling lemah adalah korelasi antara faktor kebijakan publik dengan faktor kompetensi SDM.

Tabel 3. Dekomposisi Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Produk Perikanan Prima, 2006 (n = 69)

No	Faktor-faktor yang Mempengaruhi Produk Perikanan Prima	Koefi-sien	Nilai t	Beda Nyata
<b>1. Kebijakan Publik (X<sub>1</sub>)</b>				
a	Tujuan atau alasan rasional (X <sub>1.1</sub> )	0.600	75.00	BN
b	Tujuan diinginkan masyarakat (X <sub>1.2</sub> )	0.513	64.13	BN
c	Asumsi perumusan realitis (X <sub>1.3</sub> )	0.562	70.25	BN
d	Informasi perumusan lengkap dan benar (X <sub>1.4</sub> )	0.614	76.75	BN
e	Manfaat tersosialisasi kepada masyarakat (X <sub>1.5</sub> )	0.488	61.00	BN
f	Advokatif dalam hal terjadi perbedaan (X <sub>1.6</sub> )	0.548	68.50	BN
g	Antisipatif terhadap perubahan (X <sub>1.7</sub> )	0.458	57.25	BN
h	Dukungan SDM dalam pelaksanaan (X <sub>1.8</sub> )	0.749	93.63	BN
i	Dukungan Anggaran dalam pelaksanaan (X <sub>1.9</sub> )	0.612	76.50	BN
j	Dukungan sarana & prasarana dlm pelaksanaan (X <sub>1.10</sub> )	0.501	62.63	BN
k	Dukungan informasi dalam pelaksanaan (X <sub>1.11</sub> )	0.505	63.13	BN
l	Memperoleh legitimasi (X <sub>1.12</sub> )	0.580	72.50	BN
m	Partisipasi publik dalam pelaksanaan (X <sub>1.13</sub> )	0.426	53.25	BN
n	Kepatuhan aparat DKP thp ketentuan dlm kebijakan (X <sub>1.14</sub> )	0.261	32.63	BN
o	Kepatuhan aparat Dinas PK thp ketentuan dlm kebijakan (X <sub>1.15</sub> )	0.337	42.13	BN
p	Kepatuhan karyawan UPI thp ketentuan dlm kebijakan (X <sub>1.16</sub> )	0.544	68.00	BN
<b>2. Orientasi Kewirausahaan (X<sub>2</sub>)</b>				
a	Tindakan kompetitif (X <sub>2.1</sub> )	0.661	82.63	BN



b	Teknik-teknik baru dalam pengolahan ikan ( $X_{2,2}$ )	0.612	76.50	BN
c	Sikap kompetitif dalam menghadapi persaingan ( $X_{2,3}$ )	0.551	68.88	BN
d	Kepemimpinan R&D ( $X_{2,4}$ )	0.575	71.88	BN
e	Jenis-jenis produk baru ( $X_{2,5}$ )	0.628	78.50	BN
f	Perubahan produk ( $X_{2,6}$ )	0.563	70.38	BN
g	Kecenderungan mengambil resiko ( $X_{2,7}$ )	0.450	56.25	BN
h	Keberanian menghadapi lingkungan bisnis ( $X_{2,8}$ )	0.606	75.75	BN
<b>3. Kompetensi SDM (<math>X_3</math>)</b>				
a	Pengetahuan mengenai HACCP ( $X_{3,1}$ )	0.432	54.00	BN
b	Pengetahuan mengenai teknologi pengolahan ( $X_{3,2}$ )	0.446	55.75	BN
c	Ketrampilan mengenai HACCP ( $X_{3,3}$ )	0.414	51.75	BN
d	Ketrampilan mengenai teknologi pengolahan ( $X_{3,4}$ )	0.483	60.38	BN
e	Penghargaan ( <i>reward</i> ) bagi karyawan ( $X_{3,5}$ )	0.806	100.75	BN
f	Kesempatan berkembang bagi karyawan ( $X_{3,6}$ )	0.863	107.88	BN
g	Gaji/upah bagi karyawan ( $X_{3,7}$ )	0.611	76.38	BN
h	Rencana karier bagi karyawan ( $X_{3,8}$ )	0.911	113.88	BN
i	Komunikasi antar personil dalam perusahaan ( $X_{3,9}$ )	0.892	111.50	BN

Tabel 4. Korelasi Antar Faktor yang Mempengaruhi Produk Perikanan Prima, 2006 ( $n = 26$ )

Faktor Penentu	$X_1$ (Kebijakan Publik)	$X_2$ (Orientasi Kewirausahaan)	$X_3$ (Kompetensi SDM)
$X_1$ (Kebijakan Publik)	1,000	0,304	0,213
$X_2$ (Orientasi Kewirausahaan)	0,304	1,000	0,455
$X_3$ (Kompetensi SDM)	0,213	0,455	1,000

### 3.2 Pembahasan

Daya saing, yang dicerminkan oleh kemampuan perusahaan/negara dalam merebut pangsa pasar, menjadi kriteria utama Produk Perikanan Prima karena dalam praktik pemasaran, suatu perusahaan/negara yang mempunyai pangsa pasar besar pada umumnya dapat mengendalikan pasar. Dengan demikian, tuntutan pasar seperti persyaratan mutu dan keamanan produk bisa tidak merupakan faktor yang penting bagi perusahaan/negara yang menjadi pemimpin pasar (*market leader*).

Sementara itu, tidak signifikannya nilai tambah dimungkinkan karena pengembangan produk dilakukan oleh perusahaan berdasarkan permintaan pasar.

Orientasi kewirausahaan merupakan faktor yang paling besar peranannya terhadap Produk Perikanan Prima karena jaminan mutu dan keamanan produk, nilai tambah serta daya saing tidak akan dicapai tanpa adanya sikap proaktif, inovatif dan pengambilan resiko. Sikap proaktif akan menjadikan perusahaan mendapat informasi lebih awal dibanding pesaing, sehingga dapat melakukan langkah-langkah antisipatif untuk meningkatkan daya saing. Inovasi banyak berkaitan dengan pengembangan atau terobosan teknologi, terutama untuk menghasilkan nilai tambah dan daya saing yang tinggi. Sementara itu, pengambilan resiko yang merupakan keberanian dalam mengalokasikan sumberdaya dan mengambil keputusan dalam situasi ketidakpastian diperlukan karena pengembangan Produk Perikanan Prima mengandung resiko, sementara hasil yang diperoleh belum pasti.

Kebijakan publik menjadi faktor penentu Produk Perikanan Prima ke dua karena efektivitas pelaksanaan kebijakan publik sangat ditentukan oleh orientasi kewirausahaan. Sementara itu, kompetensi SDM menjadi faktor penentu ke tiga karena kompetensi SDM tidak akan meningkat tanpa adanya orientasi kewirausahaan dan dukungan kebijakan publik.

Pada faktor kebijakan publik, dukungan SDM memiliki pengaruh yang paling kuat, karena SDM tidak hanya sekedar obyek kebijakan, tetapi berperan juga sebagai subyek kebijakan. Oleh karena itu, ketersediaan SDM secara memadai, baik dalam jumlah maupun kompetensi merupakan faktor terpenting yang menentukan kinerja kebijakan.

Tindakan kompetitif merupakan aspek yang paling kuat pengaruhnya pada faktor orientasi kewirausahaan, karena persaingan dalam bisnis pengolahan ikan, terutama dalam pengadaan bahan baku, sangat ketat sehingga perusahaan harus menerapkan strategi tertentu baik dalam memperoleh maupun memanfaatkan sumberdaya dalam proses bisnis (Penrose, 1959, 1995 dalam Rachmadi, 2005).

Pada faktor kompetensi SDM, rencana karier bagi karyawan mempunyai pengaruh yang paling kuat, karena seseorang memerlukan kepastian tentang apa yang akan didapat ketika berprestasi.

Korelasi antara faktor orientasi kewirausahaan dengan faktor kompetensi SDM mempunyai pengaruh yang paling kuat terhadap Produk Perikanan Prima karena kombinasi antara sikap proaktif, inovatif dan keberanian mengambil resiko yang melekat pada pihak manajemen dengan pengetahuan, ketrampilan dan motivasi kerja karyawan merupakan kunci dihasilkannya Produk Perikanan Prima.

Dalam kaitannya dengan kriteria Produk Perikanan Prima, opsi kebijakan yang perlu ditempuh oleh pemerintah berdasarkan urutan prioritasnya adalah ; (1) peningkatan daya saing, (2) peningkatan jaminan mutu dan keamanan produk, dan (3) peningkatan nilai tambah melalui pengembangan produk bernilai tambah tinggi.

Kebijakan yang terkait dengan faktor penentu Produk Perikanan Prima yang perlu ditempuh pemerintah berdasarkan urutan prioritasnya adalah : (1) pengembangan orientasi kewirausahaan, (2) peningkatan efektifitas pelaksanaan kebijakan melalui penyempurnaan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. Kep. 01/Men/2002, dan (3) peningkatan kualitas kompetensi SDM. Disamping itu, perlu juga diterbitkan kebijakan komprehensif yang mencakup kombinasi antar faktor tersebut.

Opsi kebijakan tersebut di atas apabila dilaksanakan secara konsisten akan berdampak positif terhadap pembangunan perikanan, antara lain : (1) berkembangnya industri pengolahan ikan, (2) meningkatnya manfaat ekonomi sumberdaya ikan, (3) meningkatnya pendapatan devisa negara dari ekspor hasil perikanan, dan (4) meningkatnya penyerapan tenaga kerja yang semuanya akan bermuara pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat dan menunjang pembangunan daerah.

## **4. KESIMPULAN DAN SARAN**

### **4.1 Kesimpulan**

- 1) Kriteria Produk Perikanan Prima yang mempunyai pengaruh paling kuat adalah daya saing, diikuti mutu dan keamanan produk. Sedangkan nilai tambah produk pengaruhnya kecil sekali atau dapat dikatakan tidak mempunyai pengaruh.
- 2) Seluruh faktor penentu Produk Perikanan Prima mempunyai peranan secara signifikan. Faktor yang peranannya paling besar adalah orientasi kewirausahaan, yang kedua adalah kebijakan publik, dan yang paling kecil adalah kompetensi SDM.

### **4.2 Saran**

Dalam rangka pembangunan industri pengolahan ikan, pemerintah perlu segera mengeluarkan kebijakan yang diarahkan untuk meningkatkan daya saing produk perikanan di pasar global serta meningkatkan jaminan mutu dan keamanan produk. Arah kebijakan tersebut dapat ditempuh melalui (1) pengembangan orientasi kewirausahaan, (2) peningkatan efektifitas pelaksanaan kebijakan melalui penyempurnaan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. Kep. 01/Men/2002, dan (3) peningkatan kualitas kompetensi SDM.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Brasili, Andrea., Epifani P., Helg R., 1999. *On the dynamics of Trade Pattern*. Liuc Papers.
- Byrne, Barbara M., 2001. *Structural Equation Modeling with AMOS : Basic Concepts, Applications and Programming*. Lawrence Erlbaum Associates Publishers, London.
- Dunn, William N., 2000. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Nikijuluw, Victor P. H., 2005. *Politik Ekonomi Perikanan : Bagaimana dan Kemana Bisnis Perikanan?*. PT. Fery Agung Corporation (FERACO), Jakarta.

- Rachmadi, Bambang N., 2005. Model Pengembangan Kinerja Franchise di Indonesia : Peranan *Governance Structure*, Orientasi Kewirausahaan (*Entrepreneurial Orientation*) dan Sumberdaya Berbasis Pengetahuan (*Knowledge-Based Resources*). Disertasi - tidak dipublikasikan. Program Studi Ilmu Manajemen Pascasarjana Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta.
- Shermon, Ganesh, 2004. Competency based HRM. Tata McGraw-Hill Publishing Company Limited, New Delhi.
- Suharto, Edi, 2005. Analisis Kebijakan Publik. CV. Alfabeta, Bandung.
- Wibowo, Arief, 2005. Pengantar Analisis Persamaan Struktural (*Structural Equation Modeling*). Lembaga Penelitian Universitas Airlangga, Surabaya.
- Zugarramurdi, Aurora. *Competitiveness of Value Adding in Developing Countries*. [http://www.fao.org/documents/show\\_cdr.asp?urlfile=docrep/007/y5767e/y5767e0n.htm](http://www.fao.org/documents/show_cdr.asp?urlfile=docrep/007/y5767e/y5767e0n.htm)